

**PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMBERIAN PEMBIAYAAN (KREDIT) PADA
PT BPRS PUDUARTA INSANI TEMBUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH:

NAMA :LISA PRATIWI PUTRI
NPM :1405170378
PROGRAM STUDI :AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : LISA PRATIWI PUTRI
N P M : 1405170378
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN PEMBIAYAAN (KREDIT) PADA PT BPRS PUDJARTA INSANI TEMBUNG
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Penguji II

SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE, Ak, MM

Pembimbing

RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANI PRI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : LISA PRATIWI PUTRI
N.P.M : 1405170378
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI AUDIT
Judul Penelitian : PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN PEMBERIAN
PEMBIAYAAN (KREDIT) PADA PT BPRS PUDUARTA
INSANI TEMBUNG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURL., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapf. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : LISA PRATIWI PUTRI
N.P.M. : 1405170378
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AUDIT
ALAMAT RUMAH : JL. AMPERA RAYA
JUDUL PENELITIAN : PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN
PEMBIAYAAN (KREDIT) PADA PT BPRS
PUDUARTA INSANI TEMBUNG

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	T. Tangan
17-3-2018	- Pembacaan hasil penelitian tentang akuntansi sistem pengendalian internal kredit.	P.
	- Pembacaan deskripsi prosedur pemberian kredit.	
19-3-2018	- Pembacaan pembahasan hasil dan hasil penelitian.	P.
	- Pembacaan penulisan kembali dan hasil baca.	
22-3-2018	- Pembacaan kesimpulan dan saran.	P.
	- Pembacaan kata pengantar dan daftar isi.	
28-3-2018	- Pembacaan Abstrak	P.
	Acc bimbingan 28/3/2018	

Medan, 2018

Dosen Pembimbing
Skripsi

RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Pratiwi Putri

NPM : 1405170378

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan (Kredit) pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. BPRS Puduarta Insani Tembung.

Dan apabila ternyata kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 29 Maret 2018

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,




Lisa Pratiwi Putri

ABSTRAK

LISA PRATIWI PUTRI. 1405170378. Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan (Kredit) pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung, 2018, Skripsi.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung pada tahun 2014-2017. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung menunjukkan bahwa auditor internal tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya dalam pemeriksaan pemberian kredit. Hal ini didukung dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa pemberian kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung kurang adanya pengawasan yang memadai.

Kata Kunci: Auditor Internal, Sitem Pengendalian Intern, Kredit.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta Shalawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallama sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penyusunan Skripsi ini berdasarkan pengalaman penulis melaksanakan penelitian pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Tembung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukan yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda Ponijo dan ibunda Nurmalia Nasution yang menyayangi saya tiada henti dan selalu ada dikala saya membutuhkan nasihat dan dukungan, serta telah mengorbankan waktu, materi, dan spiritual dalam mengasuh

penulis sejak kecil hingga dewasa, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga ayahanda dan ibunda selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan menjemput rezekinya, diberikan kesehatan dan umur yang berkah dan semoga penulis bisa membahagiakan keduanya. Aamiin.

2. Adik lelaki tersayang Muhammad Al Fazar, adik Doni Erik Ruliamsyah, dan Ibu Nurasia yang selalu memberikan bantuan moril maupun materiil.
3. Bapak Dr. H. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Riva Ubar Harahap selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan semangatnya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

10. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Untuk seluruh pegawai BPRS Puduarta Insani Tembung yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan selama penulis melakukan penelitian.
12. Untuk bapak, ibu, kakak, adik, sahabat yang memberikan dukungan dan semangatnya lewat lisan mapupun tulisan, Yuspita, Aisyah, Indah, Tun Sriyani, kak Hikmah, Ayu, Buk Adel, Buk Lina, Pak Rikhi, Pak Ramli, Pak Maska, Pak Udin, Pak Kamto, Pak Hikmah, Pak Iqbal, Pak Arsyil, dik Wardah, dik Indah, dik Hotmaidah, dik Odi, dan semuanya. Terimakasih atas waktu, dukungan dan informasi yang diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi.
13. Teman-teman FOKUS (Forum Komunitas Satra) Kak Dina, Feby, Bang Dedy, Bang Ubay, Kak Fitri dan semuanya, yang tiada hentinya memberikan ilmu dan motivasi menulis, semoga kelak kita menjadi penulis hebat yang amanah dengan karya penuh pesan mendidik.
14. Terima kasih kepada Ibu Juliani sebagai ibu asrama dan teman-teman satu asrama Rusunawa UMSU yang sudah seperti saudara selama 3 tahun tinggal bersama. Banyak suka dan duka yang terlewati bersama semoga menjadi kenangan manis yang mengesankan untuk kita kenang kelak.
15. Terima kasih kepada umi dan teman-teman tercinta Mahabbah yang selalu memberi nasihat, semangat dan doanya, semoga selalu lahir kebaikan-kebaikan hebat dan kabar gembira dari kita semua.

16. Teman-teman seperjuanganku sekelas G Akuntansi Pagi dan Sore, sekelas Konsentrasi Audit, dan semua mahasiswa/siswi angkatan 2014 yang telah memberikan informasi, arahan, dan semangat kepada penulis.

17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 29 Maret 2018

Penyusun

Lisa Pratiwi Putri

NPM. 1405170378

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
BAB II: LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Auditor Internal	9
a. Pengertian Auditor Internal	9
b. Kedudukan Auditor Internal di dalam Perusahaan	11
2. Sistem Pengendalian Internal	13
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	13
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	14
c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal.....	16
d. Komponen-Komponen Sistem Pengendalian Intern.....	20
3. Kredit	23
a. Pengertian Kredit	23
b. Manfaat Kredit	26
c. Jenis-Jenis Pemberian Kredit.....	29

d. Sistem Pengendalian Internal Kredit	33
4. Penelitian Terdahulu	39
B. Kerangka Berpikir	44
BAB III: METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Definisi Operasional Variabel	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data	52
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	53
2. Struktur Organisasi PT BPRS Puduarta Insani Tembung	54
3. Pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS Pudarta Insani Tembung	60
4. Sistem Pengendalian Intern PT BPRS Puduarta Insani Tembung....	64
a. Lingkungan Pengawasan	64
b. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit	65
B. Pembahasan	70
1. Sistem Pengendalian Intern Kredit	70
a. Lingkungan Pengawasan	70
b. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit	72
2. Prosedur Pemberian Kredit.....	73
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I-1 Jumlah Kredit yang diberikan dan jumlah Kredit Macet Tahun 2014-2017	4
TABEL II-1 Penelitian Terdahulu	39
TABEL III-1 Pelaksanaan Penelitian	49

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II-1 Kerangka Berpikir.....	46
GAMBAR IV-1 Struktur Organisasi PT BPRS Puduarta Insani Tembung	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin ketatnya persaingan di dunia Perbankan saat ini membuat sebuah Bank harus bisa membuat para nasabahnya tetap loyal kepada Bank tersebut dan hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bank sebagai suatu badan usaha yang memiliki peran penting diantara dua pihak yang saling membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki atau kelebihan dana, maka harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Ayat 4). Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pembiayaan atau kredit berdasarkan prinsip syariah adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya, yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Dalam hal ini Bank menyediakan sebuah program dimana Bank menerima simpanan dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Kredit ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam upaya membuka usaha sendiri atau mandiri. Dengan adanya aktivitas kredit maka pada bank perlu melakukan analisis kredit guna mengetahui seberapa besar risiko kredit macet yang terjadi pada bank tersebut. Salah satu cara untuk mengurangi risiko kredit macet yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap latar belakang nasabah yang sebelumnya pernah melakukan kredit pada

bank lain, untuk mengetahui sejauh mana ketertiban nasabah dalam membayar kredit sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati,

PT. BPRS Puduarta Insani Tembung merupakan salah satu badan usaha berbentuk Bank pembiayaan rakyat yang memiliki fungsi utama untuk menyimpan dan menyalurkan dana (kredit) kepada masyarakat. Menurut Jusuf (2008:10) pemberian kredit sudah pasti mengandung risiko dan disinilah peran *Account Officer (AO)* untuk memperkecil atau menghindari risiko sebelumnya. Risiko kredit yang dimaksudkan, yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit. Salah satu cara untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman, lancar, dan produktif adalah bank perlu melakukan pengendalian intern perkreditan. Menurut Rivai (2007:105) setiap Bank wajib melakukan kajian berkala atas efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan. Penerapan pengendalian intern perkreditan juga harus diterapkan pada semua prosedur pemberian kredit.

Table I-1
Jumlah kredit yang diberikan dan jumlah kredit macet
Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Kredit yang Diberikan	Jumlah Kredit Macet
2014	Rp 31.295.786.000	Rp 104.857.000
2015	Rp 38.245.506.000	Rp 118.270.000
2016	Rp 41.471.753.000	Rp 199.973.000
2017	Rp 40.324.347.000	Rp 551.070.000

Sumber: OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2018

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, persentase *Non Performing Financing (NPF)* atau kredit macet pada PT. BPRS Puduarta Insani selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan NPF pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,37%, lebih besar dari tahun 2016 yaitu sebesar 0,48%, tahun 2016 lebih besar dari tahun 2015 yaitu sebesar 0,30%, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan angka kredit macet jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 0,33%. Tingginya persentase atas kredit macet yang ada pada PT. BPRS Puduarta Insani disebabkan banyaknya tunggakan pembayaran oleh nasabah. Jika kredit macet tidak segera diatasi, maka akan memberikan dampak pada PT. BPRS Puduarta Insani, yaitu semakin meningkatnya persentase kredit macet yang ada dan menyebabkan perkreditan pada PT BPRS Puduarta Insani cenderung *stagnant*. Sehingga target perusahaan akan sulit tercapai.

Setiap fungsi jabatan pada PT. BPRS Puduarta Insani memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, pedoman kerja yang dipakai biasa disebut dengan *job description*. Dalam pedoman kerja tersebut telah dituliskan secara lengkap tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi pada PT BPRS Puduarta Insani. Namun pada PT BPRS Puduarta Insani belum ada penilaian kinerja yang dilakukan secara formal atau tertulis. Kinerja auditor internal pada PT BPRS Puduarta Insani juga menjadi salah satu hal yang menjadi bahan evaluasi. Dalam hal ini, yang dievaluasi adalah temuan-temuan auditor internal dari hasil pengawasan dan pengendalian intern pada setiap bagian, khususnya dalam hal ini adalah bagian perkreditan.

Fenomena yang ada pada perusahaan adalah auditor internal belum dapat melaksanakan fungsinya dalam memaksimalkan sistem pengendalian intern. Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan sumber daya manusia pada bagian audit internal. Pada bagian audit internal PT. BPRS Puduarta Insani hanya ada satu orang karyawan, hal tersebut menyebabkan kurang intensifnya pengawasan audit internal terhadap seluruh kegiatan yang ada pada PT. BPRS Puduarta Insani.

Namun karena masalah utama pada PT. BPRS Puduarta Insani mengenai pengendalian intern terhadap kredit macet, maka bentuk pengendalian intern yang dilakukan oleh auditor internal adalah dengan melihat indikasi-indikasi terjadinya kredit macet. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengecekan atas dokumen-dokumen angsuran oleh nasabah yang sudah tercatat dalam sistem PT.

BPRS Puduarta Insani. Apabila terlihat indikasi-indikasi nasabah yang bermasalah, sebaiknya auditor internal segera melakukan pencatatan atas temuan tersebut dan kemudian melaporkan pada bagian direksi lalu pada bagian pemberi kredit untuk dilakukan koordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan guna mencari solusi serta menyelesaikan atas masalah yang ada, hal tersebut dapat dijadikan sebagai pengendalian dini sebelum terjadinya kredit macet yang berkepanjangan dan tentunya dapat mencegah terganggunya kegiatan operasional BPRS Puduarta Insani untuk kedepannya.

Auditor internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. Sedangkan Pengendalian internal dapat dijadikan tumpuan dalam mewujudkan perusahaan yang sehat dan berhasil. Sawyers (2005:59) mendefinisikan pengendalian sebagai penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Dengan adanya suatu pengendalian yang efektif atas seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan maka perusahaan akan terhindar dari risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan, terutama dalam hal ini adalah menyangkut perkreditan. Bagi pihak manajemen adanya pengendalian intern merupakan salah

satu alat bantu untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan di dalam perusahaan.

Melihat pentingnya peran auditor internal dalam membantu manajemen meningkatkan nilai-nilai ekonomis, efisiensi serta efektivitas dalam mengelola serta mengevaluasi pengendalian internal khususnya pada perkreditan yang dalam kasus ini menangani kredit macet, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN PEMBIAYAAN (KREDIT) (Studi Kasus pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Puduarta Insani Tembung)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah:

1. Terjadi peningkatan *Non Performance Finance (NPF)* dari tahun 2015-2017.
2. Hanya terdapat satu orang auditor internal.
3. Audit planning dan audit program belum tersusun dengan jelas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

“Bagaimana peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, diharapkan dapat memperdalam wawasan mengenai auditor internal yang dihubungkan dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
2. Bagi perusahaan, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan mengenai sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit agar sistem yang telah berjalan akan lebih baik dan efisien.
3. Bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi bagi mereka yang berminat untuk mempelajari auditor internal, sistem pengendalian internal, dan kredit.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Auditor Internal

a. Pengertian Auditor Internal

Auditor internal bertugas melakukan pemeriksaan internal atas pengendalian intern perusahaan yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik serta efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Audit merupakan suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan *auditing* disebut dengan auditor.

Sawyer's (2005:10) memberikan definisi auditor internal adalah sebagai berikut:

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1)

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif—semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Selanjutnya, menurut Arfan, dkk (2015:213):

Audit internal adalah suatu aktifitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Definisi lain menurut Sukrisno (2004:221):

Mengenai internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Untuk menguji dan menilai efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan, menurut Ahmad (2017) auditor internal memerlukan standart pekerjaan lapangan yang baik, yaitu audit planning, audit program, dan audit perosedur.

Menurut Mulyadi (2010) memberikan definisi audit planning, yaitu:

Audit planning adalah pengembangan strategi yang menyeluruh atas pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun setelah *management letter* disetujui oleh pihak perusahaan. Tujuan audit

planning adalah untuk mencapai keyakinan yang memadai guna meyakini salah saji yang diyakini dalam jumlah besar, menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin untuk mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan.

Audit program adalah kumpulan prosedur audit yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Tujuan audit program untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari eksistensi atau kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya.

Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti-bukti audit (*audit avoidance*) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Auditor juga harus menjalankan prosedur pengumpulan bukti, yaitu penelusuran (*tracing*), pemeriksaan (*vouching*), perhitungan (*counting*), pelaksanaan ulang (*reperforming*), dan teknik audit berbantuan computer (*computer-assisted audit techniques*)

Dari ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa auditor internal harus mempunyai standart pekerjaan lapangan yang baik, agar dalam melakukan kegiatannya dapat dengan mudah mendeteksi adanya kecurangan dalam aktivitas internal perusahaan yang berpengaruh bagi laporan keuangan dan laporan pemberian kredit, jika auditor tidak melakukan hal ketiga ini maka terbukalah peluang kecurangan khususnya di dalam bagian kredit.

b. Kedudukan Auditor Internal di dalam Perusahaan

Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi perusahaan sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat terjadi jika kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi perusahaan memungkinkan auditor internal untuk menjalankan fungsi dengan baik, serta dapat bekerja secara independen dan objektif. Oleh karena itu, penempatan auditor internal secara jelas dalam struktur perusahaan yang

disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas akan memperlancar komunikasi auditor internal dengan pihak manajemen guna memperoleh informasi yang tepat dan jelas. Demikian pula sebaliknya, penempatan auditor internal secara tidak jelas dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak beraturan, akan menghambat kegiatan auditor internal dalam memperoleh informasi sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Menurut Sawyer's (2005:35):

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional.

Sukrisno (2013:209) mengemukakan bahwa independensi internal auditor tergantung pada:

1. Kedudukan *Internal Audit Department* (IAD) tersebut dalam organisasi perusahaan, maksudnya kepada siapa IAD bertanggung jawab.
2. Apakah IAD dilibatkan dalam kegiatan operasional. Jika ingin independen, IAD tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan.

Untuk mencapai keadaan seperti ini, maka auditor internal harus memperoleh dukungan dari pihak manajemen dan dewan komisaris, terdapat alternatif kedudukan auditor internal menurut Ahmad (2017) dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Auditor internal berada di bawah direktur keuangan.

2. Auditor internal berada di bawah direktur utama yang merupakan staf dari direktur utama.
3. Auditor internal merupakan staf dewan komisaris.

Dalam kedudukannya, auditor internal tidak memiliki wewenang langsung terhadap tingkatan manajemen di dalam organisasi perusahaan, kecuali pihak yang memang berada dibawahnya dalam satuan kerja internal audit itu sendiri. Auditor internal yang independen tidak dibolehkan untuk terlibat kegiatan operasional perusahaan apalagi kegiatan yang diperiksanya. Sulit bagi seorang auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen apabila auditor internal tersebut terlibat dalam kegiatan yang diperiksanya.

2. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai hasil dari ditetapkannya pengendalian inten maka perusahaan mampu mencapai tujuan dan meminimalkan risiko. Sistem pengendalian intern memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan akan menciptakan suatu usaha yang bersifat efisien.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001, seksi 3019:3) sistem pengendalian intern suatu usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (*assurance*) memadai bahwa tujuan tertentu dalam satuan usaha akan tercapai.

Mulyadi (2010:165) memberikan definisi sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Hery (2013:159) pengendalian intern adalah:

Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Tanggung jawab untuk menyusun suatu sistem pengendalian intern terletak pada pihak manajemen, begitu juga dengan kegiatan mengendalikan sistem pengendalian intern tersebut. Mulyadi (2001:163) mengemukakan sistem pengendalian intern menurut tujuannya yaitu:

Sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi meliputi struktur organisasi, metode yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi

dan mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. Sedangkan pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Hall (2001) menyebutkan tujuan utama penegndalian intern:

Tujuan utama dari pengendalian intern adalah: (a) untuk menjaga aktiva perusahaan, (b) untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, (c) untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan, (d) untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Menurut Hery (2013:160) tujuan utama pengendalian intern tidak lain adalah untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian dan penyalahgunaan, yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
2. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil risiko baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).
3. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (2013:15), pengendalian internal mempunyai tiga kategori tujuan yaitu:

- a. Tujuan Operasi
Tujuan ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan kinerja kinerja operasional dan keuangan, dan menjaga aset terhadap kerugian.
- b. Tujuan Pelapora

Tujuan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pelaporan non- keuangan, untuk internal maupun eksternal, yang mencakup keandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator, persyaratan yang diakui pembuat standar, atau kebijakan entitas itu sendiri.

c. Tujuan Kepatuhan

Tujuan ini berhubungan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mana entitas tunduk.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pengendalian intern kredit merupakan bagian sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data kredit. Pengendalian internal akuntansi yang akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan nasabah yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern merupakan suatu bentuk pengawasan yang fungsinya mengukur dan menilai hasil yang ingin dicapai. Menurut Mulyadi (2001:163) unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsionalnya secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, hutang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan di perusahaan. Di dalam pembagian tugas terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sebagai pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi yaitu:

1. Setiap tugas dan tanggung jawab operasi harus dijalankan sesuai dengan yang tercantum di dalam struktur organisasi.
2. Masing-masing fungsi yang terkait yaitu fungsi operasi harus terpisah dengan fungsi akuntansi, karena setiap fungsi yang terkait tersebut memerlukan otorisasi dari para pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
3. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua aktivitas transaksi. Pemberian tugas yang berlebihan akan menimbulkan risiko terhadap kegiatan aktivitasnya, sehingga apabila risiko tersebut besar maka akan mempengaruhi aktivitas operasional organisasi.

Sistem Wewenang dan Prosedur Pembukuan

Wewenang yang dilakukan di setiap fungsi yang terkait merupakan haknya sebagai penjamin atas kegiatan transaksi tersebut dengan cara memverifikasi data akuntansi yang terdapat pada bukti transaksi. Dalam

aktivitas operasional di perusahaan tentunya mempunyai prosedur, dimana prosedur merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan transaksi.

Praktik-Praktik yang Sehat

Praktik yang sehat dapat terlihat di dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- b. Pemeriksaan mendadak.
- c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya pada satu orang atau satu unit organisasi.
- d. Perputaran jabatan perlu diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga mencegah terjadinya permintaan kerjasama dari pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dihindari.

Karyawan yang Cukup Cakap

Karyawan merupakan bagian dari sumber daya manusia yang harus berkompeten di dalam melaksanakan tugasnya. Setiap perusahaan yang terdiri dari karyawan yang berkualitas dan jujur serta bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugasnya, maka unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi hingga batas minimum.

Laporan

Laporan merupakan alat bagi suatu bagian dalam perusahaan untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya. Laporan-laporan ini diserahkan kepada atasan dengan maksud agar atasan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pekerjaan-pekerjaan sudah dilaksanakan.

Standar atau *Budget*

Standar atau *budget* merupakan alat untuk mengukur realisasi. Apabila manajemen menginginkan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan bagian-bagian dalam perusahaan maka manajemen harus menyediakan alat-alat untuk mengukur realisasi. Alat pengukur ini seperti yang telah disebutkan di muka adalah standar atau *budget*. Dengan adanya standar atau *budget* maka laporan-laporan bisa disusun dengan membandingkan antara realisasi dengan *budget* atau standarnya, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Staff Audit Intern

Staff audit intern merupakan bagian atau pegawai dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu sesuai atau menyimpang dari yang sudah ditetapkan.

d. Komponen-Komponen Pengendalian Internal

Arens (2008:375) menyatakan bahwa *Internal Control-Integrated Framework* yang dikeluarkan *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), yaitu kerangka kerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, menguraikan lima komponen pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai. Komponen pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations* terdiri dari lima komponen yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personel organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:

- a. Nilai integritas dan etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- d. Struktur organisasi
- e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penilaian risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari:

- a. Perubahan standar akuntansi baru
- b. Hukum peraturan baru
- c. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi
- d. Pertumbuhan pusat suatu entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian dapat dibagi atas beberapa kelompok:

1. Pengendalian pengolahan informasi
 - a. Pengendalian umum
 - b. Pengendalian aplikasi
 1. Otorisasi memadai
 2. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai
 3. Pengecekan secara independen
2. Pemisahan fungsi yang memadai
3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan
4. Revisi atas kinerja

Informasi dan Komunikasi

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji potensial asersi manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

- a. Sah
- b. Telah diotorisasi
- c. Telah dicatat
- d. Telah dinilai secara wajar
- e. Telah digolongkan secara wajar
- f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya

- g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar

Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah struktur pengendalian internal tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Pembiayaan (kredit) diartikan dalam bahasa latin sebagai *credere* yang artinya percaya. Kepercayaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Selain kepercayaan sebagai salah unsur kredit tersebut di atas ada beberapa unsur lagi dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yaitu : waktu, yang berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh suatu tenggang

waktu. Resiko, yang berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung resiko di dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali hal ini berarti semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi resiko kredit tersebut.

Prestasi, yang berarti bahwa kesepakatan yang terjadi antara bank dengan debiturnya mengenai suatu pemberian kredit maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi. Kesepakatan, ditandai dengan adanya perjanjian kredit dan pengakuan hutang yang berarti setiap pelepasan kredit harus dilakukan dengan suatu perjanjian kredit. Kontra prestasi, yang berarti bahwa setiap debitur berkewajiban melunasi hutangnya dan membayar bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Rivai *et al* (2007:4) “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau utang dari satu pihak (kreditor) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.”

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:9) pengertian kredit berkembang lebih luas lagi antara lain: “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.”

Hasanuddin Rahman (2000:19) menyatakan kredit adalah :

Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi adalah prestasi uang,

maka transaksi kredit menyangkut uang pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko, singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa terjadinya suatu kredit salah satunya oleh karena ada keinginan untuk pemenuhan kebutuhan. Salah satu unsur kredit adalah resiko. Bagaimana cara perusahaan meminimalkan resiko atas setiap kredit adalah resiko. Bagaimana cara perusahaan meminimal resiko atas setiap kredit tersebut diadakan pengelolaan atau pembinaan kredit oleh bank sebagai kreditur.

Menurut Hasanuddin Rahman (2000:49) tujuan pengelolaan kredit (*Credit management*) oleh bank antara lain adalah :

Tujuan pengelolaan kredit (*Credit Management*) oleh bank, tidak lain adalah untuk mencegah agar kredit yang diberikan tersebut tidak menjadi bermasalah atau dapat berjalan dengan lancar dan luas sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, setiap kredit yang diberikan haruslah berpedoman pada tiga hal pokok yaitu aman, terarah dan menghasilkan.

Aman *dalam* arti bahwa setiap kredit yang diberikan telah terbebas dari segala kekurangan (*risk aspect*), termasuk *legal risk*, baik mengenai subjek hukum, objek hukum maupun mengenai jaminan dan menyangkut dengan pihak-pihak lainnya. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi kredit

bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu.

Terarah dalam arti bahwa setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi siapa menerima kreditnya maupun dari segi kegunaannya terutama bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan suatu sektor usaha.

Sebenarnya sasaran kredit yang pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai suatu alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jadi kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari faktor produksi semata. Menghasilkan dalam arti bahwa setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, baik dari segi siapa penerima kreditnya maupun dari segi kegunaannya, terutama bila dihubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka memajukan suatu sektor usaha. Menghasilkan dalam arti bahwa setiap pelepasan kredit akan memberikan keuntungan, baik bagi bank maupun bagi penerima kredit/debiturnya serta meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidup rakyat banyak.

b. Manfaat Kredit

Pemberian kredit dari lembaga keuangan dan non bank memberikan pemasukan yang sangat tinggi bagi masyarakat juga terhadap perputaran roda perekonomian bangsa. Kredit perbankan membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, dan kegiatan perdagangan. Untuk

kegiatan penyediaan kredit tersebut lembaga keuangan dan bank menerima balas jasa berupa bunga kredit. Selisih bunga kredit yang diterima dari debitur dengan bunga deposito pinjaman antar bank dan jasa giro yang mereka bayarkan kepada penitip dana, merupakan salah satu sumber pendapatan bank umum yang terbesar.

Dengan demikian harus diakui bahwa pendapatan atau keuntungan suatu bank dan lembaga keuangan salah satunya adalah bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Manfaat perkreditan dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan antara lain :

1. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut debitur:

- a) Debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa.
- b) Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus akan memperoleh berbagai manfaat.
- c) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur.
- d) Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindungi karena adanya ketentuan rahasia bank dalam undang-undang pokok perbankan.

2. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan perbankan:

- a) Memperoleh pendapatan bunga kredit
- b) Menjaga solfabilitas usaha bank, dalam arti dengan adanya pendapatan bunga kredit tersebut.
- c) Membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain.

- d) Mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
 - e) Merebut pangsa pasar (*market share*) dalam industri perbankan atau dengan kata lain fasilitas kredit yang diberikan dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar untuk merebut pangsa pasar dari industri perbankan yang ada di suatu daerah.
 - f) Memungkinkan perbankan mendidik para staffnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri secara mendetail.
3. Manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan pemerintah:
- a) Perkreditan dapat digunakan sebagai alat kegiatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
 - b) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter, sebagai ilustrasi dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah tentunya akan sangat berkepentingan terhadap kegiatan perkreditan secara makro.
 - c) Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/kegiatan, alat peningkatan pendapatan masyarakat.
 - d) Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara, dalam arti bahwa pendapatan dari pemberian kredit dari bank-bank pemberian negara merupakan sumber pendapatan bagi negara.
4. Manfaat kredit ditinjau dari masyarakat luas:
- a) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan

kenaikan tingkat pendapatan peraturan dan pemerataan pendapatan di masyarakat.

- b) Terbukanya kemungkinan keterlibatan golongan profesi tertentu atas suatu proses pemberian kredit oleh bank, yang tentunya juga dapat meningkatkan penghasilannya seperti konsultan, akuntan publik, notaris.
- c) Masyarakat dapat menikmati hasil proyek yang dibiayai oleh kredit bank.

Dari uraian manfaat perkreditan di atas bila dihubungkan dengan kredit yang berwawasan lingkungan tentunya sangat ideal sebab mempunyai manfaat yang besar untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup.

c. Jenis-Jenis Pemberian Kredit

Setelah dengan luasnya variasi jenis-jenis kegiatan usaha yang ada dalam sistem perekonomian di masyarakat, ternyata juga membawa pengaruh kepada variasi dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh sektor perbankan. Hal ini dapatlah dimaklumi sebagai salah satu upaya pihak perbankan dalam melaksanakan salah satu diversifikasi dari produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Di samping itu juga dimaksudkan agar pihak perbankan dapat melayani kebutuhan dana dan sumber-sumber permodalan lainnya kepada calon debiturnya sesuai dengan kebutuhannya yang setepat-tepatnya. Hal ini jelas merupakan kebutuhan kedua belah pihak baik debitur maupun pihak bank sendiri.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:26) jenis kredit dibagi menjadi :

1. Kredit modal kerja
2. Kredit investasi
3. Kredit personal loan
4. Non cash loan
5. Kredit kelolaan
6. Kredit investasi kecil dan kredit modal kerja permanen, kredit masal, kredit usaha kecil, kredit kelayakan usaha dan kredit candak kulak
7. Kredit kelayakan
8. Kredit untuk pengembangan sumber daya manusia
9. Kredit ekspor
10. *Overdraft Facility*
11. *Syndication Loan*

Suatu hal yang paling mendasar dalam setiap pemberian kredit perbankan adalah, bahwa setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank betapa tidak sebelumnya seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit, oleh bank telah melakukan penelitian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan kondisi atau prospek usaha yang bersangkutan.

Adapun syarat-syarat penilaian kredit menurut Hasanuddin Rahman (2000:30) adalah sebagai berikut :

1. *Carakter*, sifat pribadi sipemohon kredit
2. *Capital*, berhubungan dengan keuangan sipeminjam
3. *Capaciti*, yaitu apakah sipemohon kredit mengendalikan perusahaannya dengan baik
4. *Coleteral*, yaitu bentuk dan nilai jaminan yang diberikan oleh sipenerima kredit
5. *Condition of economic*, situasi dan kondisi perekonomian dengan menekankan pada peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5 C dan ada juga yang menyebutkan sebagai prinsip 6 C.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:11) keenam prinsip yang klasik meliputi :

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Coleteral*
5. *Condition of economic*
6. *Constraint*

Dalam perkembangan bisnis perbankan yang mengarah kepada “*One stop shopping bank*” maka permasalahannya akan semakin rumit karena perkreditan itu sendiri akan saling kait mait dengan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya akan membantu “*net work*” yang tidak putus-putusnya. Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka diperlakukanlah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu sendiri itu berlangsung.

Dalam menetapkan kebijaksanaan perkreditan tersebut harus diperhatikan tiga asas pokok yaitu :

- a. *Asas likuiditas*, yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas.

- b. *Asas Solvabilitas*. Usaha pokok perbankan yaitu penerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kecil. Dalam kebijaksanaan perkreditan maka bank harus pandai-pandai mengatur penanaman dana ini baik pada bidang perkreditan, surat-surat berharga pada suatu tingkat resiko kegagalan yang sekecil mungkin.
- c. *Asas Rentabilitas*. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya. Laba yang diperoleh dari perkreditan merupakan selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur.

Selanjutnya di samping "*top management*" suatu bank harus mempertahankan tiga asas di atas maka ia harus pula mempertahankan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan perkreditan yaitu :

- a. Keadaan perekonomian, perkembangan politik.
- b. Peraturan-peraturan penguasa moneter yang ada.
- c. Kemampuan bank yang bersangkutan dalam mengumpulkan dana dengan biaya yang relatif murah.
- d. Volume permintaan kredit dari masyarakat bisnis.
- e. Tingkat (besarnya) laba yang diharapkan.
- f. Kemampuan manajemen bank itu sendiri.
- g. Para saingan dari bank-bank/lembaga keuangan lainnya yang memasarkan jasa perkreditan.

Dalam praktek sehari-hari ketiga asas di atas satu sama lainnya ada kemungkinan pada posisi yang lain akan saling bertentangan misal antara kepentingan likuiditas dan kepentingan rentabilitas.

Menurut William and Charles dalam buku Teguh Pudjo Muljono (2001:22) tujuan dari penetapan kebijaksanaan kredit yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk penyediaan sarana penjagaan terhadap asset bank dan dana yang disimpan oleh para deposant secara memadai.
2. Sebagai dasar pedoman kerja dalam menghadapi perkembangan perekonomian khususnya yang menyangkut kegiatan perbankan.
3. Sebagai pedoman bagi para pejabat kredit bank yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
4. Sebagai dasar dalam melaksanakan pengawasan, arena policy merupakan "*decision made in advance*" maka kebijaksanaan (policy) ini merupakan pola tolak ukur dari apa-apa yang harus dilaksanakan oleh para petugas di lapangan.

Akhirnya agar kebijaksanaan kredit tersebut dapat tetap bermanfaat secara optimum haruslah direview dari waktu ke waktu agar sesuai dengan situasi dan kondisi perkreditan yang berlaku. Hasil review tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian (*up dating*) dari kebijaksanaan kredit yang sudah usang.

d. Sistem Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern pemberian kredit yang baik harus meliputi unsur-unsur pengendalian intern itu sendiri, yaitu lingkungan pengawasan pemberian kredit, sistem akuntansi pemberian kredit dan prosedur pemberian kredit.

Dalam lingkungan pengawasan ini adalah dengan menyusun struktur organisasi perusahaan, dengan pertimbangan bahwa organisasi itu harus fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa mengadakan perubahan total. Selain itu organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis dan tanggung jawab yang jelas, dalam arti jangan sampai terjadi adanya overlap fungsi masing-masing bagian. Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu pengawasan yang baik, hendaknya struktur organisasi dapat memisahkan fungsi-fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan. Pemisahan fungsi-fungsi ini diharapkan dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan dalam perusahaan.

Untuk unsur sistem akuntansi dalam suatu perusahaan merupakan alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap pemberian kredit dan transaksi-transaksi yang terjadi dan juga untuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan tepat. Klasifikasi data akuntansi ini dapat dilakukan dalam rekening-rekening buku besar.

Sedangkan prosedur pengawasan adalah kebijakan dan prosedur yang diterapkan manajemen dalam lingkungan pengendalian untuk memberikan cukup kepastian bahwa sasaran perusahaan akan tercapai. Prosedur tersebut harus dapat menciptakan pengendalian intern yang cukup terhadap pemberian kredit perusahaan, meningkatkan efisiensi serta mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam prosedur pengawasan ini termasuk juga prosedur pembukuan yang merupakan suatu alat bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap operasi dan transaksi-transaksi pemberian kredit.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2001:270) beberapa pokok utama dalam pengendalian kredit adalah sebagai berikut :

1. Harus ada sistem pengendalian intern yang baik, dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur penagihan, analisis, administrasi kredit dan taksasi agunan.
2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan, ketentuan mengenai jenis dilarang, ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum), ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi, ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur, konsentrasi kredit dan pengertian kredit bermasalah dan penanganannya.
3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit. Artinya para pengelola kredit di bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank intern, ketentuan Bank Indonesia maupun dalam hal mengenai permasalahan dengan nasabahnya.
4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan ini pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut di atas masalah yang harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pengendalian perkreditan tersebut adalah untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan bank, bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk

menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank/intern bank.

Salah satu aspek terpenting guna terjaminnya sistem pengendalian intern perkreditan adalah terpeliharanya dengan file kredit nasabah di bank. Ini merupakan *record* bank terhadap nasabah kreditnya. Data pokok yang harus ada untuk setiap kredit adalah surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dalam pengendalian intern perkreditan ada beberapa pokok utama yang harus diperhatikan oleh semua bank dan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkreditan.

Kalau diperhatikan satu persatu dari masing-masing tujuan itu sebetulnya mempunyai kaitan yang erat satu sama lainnya. Sebagai misal adanya administrasi perkreditan yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan memajukan efisiensi pengelolaan di bidang perkreditan dan seterusnya. Jadi dengan demikian pelaksanaan pengawasan perkreditan tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas tidak semata-mata mencari tau menemukan adanya penyimpangan dan penyelewengan saja seperti anggapan sementara orang.

Salah fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap pengendalian, begitu juga halnya di dalam perkreditan, karena

kegiatan pengendalian merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan (diinvestasikan) di bidang perkreditan.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:460) mengemukakan bahwa secara spesifik pengertian pengendalian kredit dalam arti luas dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

Yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pengendalian kredit ini merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan harta dalam bentuk kredit. Pengertian pengamanan disini bersifat represif, untuk menyelamatkan kemungkinan-kemungkinan kerugian yang potensial akan timbul lebih besar.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:460) secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dari pengendalian perkreditan itu adalah sejalan dengan pengertian pengendalian tersebut, yaitu :

1. Agar penjagaan/pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstern bank/intern bank.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.
3. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
4. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas manual perkreditan surat-surat edaran dan dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari pengendalian tersebut mempunyai kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, dengan adanya administrasi perkreditan yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu mempermudah menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

Adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan memajukan efisiensi pengelolaan di bidang perkreditan dan seterusnya. Jadi dengan demikian pelaksanaan pengendalian perkreditan tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan tidak semata-mata mencari atau menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan saja seperti anggapan sementara orang.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (2001:462) ruang lingkup dari pengendalian kredit dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengawasan dalam arti sempit yaitu berupa pengawasan administrasi yang mempunyai ruang lingkup untuk mengetahui kebenaran data-data administratif.
2. Pengawasan dalam arti luas yaitu merupakan kegiatan pengendalian di dalam suatu perusahaan yang kita kenal dengan manajemen kontrol yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu di bidang :
 - Financial di dalam pelaksanaannya sering kita sebut financial audit.
 - Operational sering kita sebut Operational Audit performance audit.
 - Management/Policy sering kita sebut management audit.

Dari pengertian di atas ruang lingkup pengendalian kredit sangat luas, yaitu meliputi bidang administrasi dan financial. Untuk masing-masing jenis

kredit memerlukan pola pengawasan yang berbeda satu sama lainnya sesuai situasi dan kondisi dari debitur itu sendiri.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi *auditee* secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari *auditee* antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, dan ketentuan lainnya. Untuk dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh atas sistem yang akan diaudit perlu dibuat suatu bagan alur, sehingga karakteristik kegiatan yang berkaitan satu dengan lainnya akan dapat lebih mudah dipahami.

Tabel 11-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Robin Gita Mandiri, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan	2014	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mandala Giri Amertha Di Desa Tajun.	Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel simple random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

				<p>penelitian adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai dan tiap elemen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.</p>
2.	Nurmala	2015	<p>Analisis Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Griya Bni Pada Bni Lnc Palembang.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit Griya pada BNI LNC Palembang. Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang dipakai dalam penelitian data sekunder, dimana teknik analisis data yaitu dengan cara menganalisis pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit griya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan bahwa pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit griya pada BNI LNC sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana ketat dan selektifnya prosedur dalam meneliti dan menyeleksi</p>

				<p>calon nasabah sebelum yang mau akad kredit disetujui oleh pihak bank, namun masih perlu ditingkatkan lagi penerapan standar operasional khususnya bagi petugas dalam melakukan survey lapangan terhadap calon nasabah maupun fisik rumah yang akan diambil karena belum ada petugas khusus, tapi ditunjuk berdasarkan situasi dan kondisi sumber daya manusia yang ada saja pada saat survey dilakukan.</p>
3.	Zaini Widya dan Sucipto	2009	<p>Pengendalian Intern Sebagai Alat dalam Meningkatkan Kualitas Kredit di PT. BRI Tbk Cabang Medan Putri Hijau</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dalam menyalurkan kredit, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau berasaskan atas kelayakan usaha, dimana dalam hal ini pihak bank akan melakukan analisis terhadap kegiatan usaha calon debitur untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit. Pengendalian intern atas pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau sudah sesuai dengan prosedur kebijakan manajemen perusahaan. Kualitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau dinyatakan lancar terbukti dari nilai <i>non performing loans</i> yang berada dibawah 5% dan dengan menganalisa beberapa factor faktor yang mendukung. Saran</p>

				<p>yang diberikan oleh peneliti adalah diharapkan sistem pengendalian intern dalam penyaluran kredit yang telah ditetapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Medan Putri Hijau dapat terus dilaksanakan dengan baik dengan tujuan menghindari adanya ketidakmampuan untuk membayar oleh debitur yang akan merugikan pihak bank. Pengendalian intern yang dilakukan secara efektif dan efisien terhadap penyaluran kredit agar lebih ditingkatkan lagi sehingga resiko kredit macet dapat diminimalisir seiring dengan meningkatnya permintaan kredit di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Keterbatasan dari penelitian adalah hanya mengevaluasi pengendalian intern secara deskriptif, dan sumber data hanya berasal dari wawancara, observasi dan studi pustaka.</p>
4.	Alif Widya Aryani	2009	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. BPR Pasar Boja	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah attribute sampling (Stop or Go Sampling). Hasil dari penelitian ini adalah konsentrasi pengurus PT. BPR Pasar Boja terfokus pada ekspansi kredit dan kurang memberi perhatian pada penyelesaian kredit bermasalah. Adanya nasabah yang menggunakan dana kredit untuk membiayai pengobatan anggota keluarganya alih-alih sebagai modal usaha. Adanya nasabah yang menggabungkan</p>

				<p>pengelolaan kredit usahanya dengan pengelolaan keuangan keluarga sehingga mempengaruhi usahanya. Adanya kenaikan harga BBM, tarif listrik dan transportasi sehingga meningkatkan biaya hidup rumah tangga dan biaya produksi. Nasabah tidak dapat merespon dengan cepat kondisi yang disebabkan tingginya laju inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat sehingga terjadi kemunduran dan bahkan kegagalan usaha. Saran yang diberikan peneliti adalah PT. BPR Pasar Boja sebaiknya mulai menggunakan formulir-formulir yang bernomor urut tercetak dalam prosedur pemberian kredit untuk memaksimalkan efektivitas sistem pengendalian intern pemberian kredit. PT. BPR Pasar Boja sebaiknya melakukan diversifikasi target market kepada sektor selain sektor perdagangan untuk menurunkan risiko kredit. Keterbatasan dari penelitian ini adalah kurang mendalamnya wawancara yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi rasio NPL PT. BPR Pasar Boja.</p>
5.	Nomita Desi	2009	Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang	<p>Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Danamon Tbk. Cabang Semarang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah PT. Bank Danamon</p>

				<p>Tbk. Cabang Semarang memilih menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa perkreditan melalui jalur penyelesaian non litigasi dapat memperoleh hasil yang maksimal. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kredit bermasalah pada sektor perbankan. Perbedaannya, pada penelitian yang relevan lebih menitikberatkan pada cara atau jalur penyelesaian kredit bermasalah, sedangkan pada penelitian ini lebih pada analisis terhadap kinerja auditor internal dalam penyelesaian kredit bermasalah.</p>
--	--	--	--	--

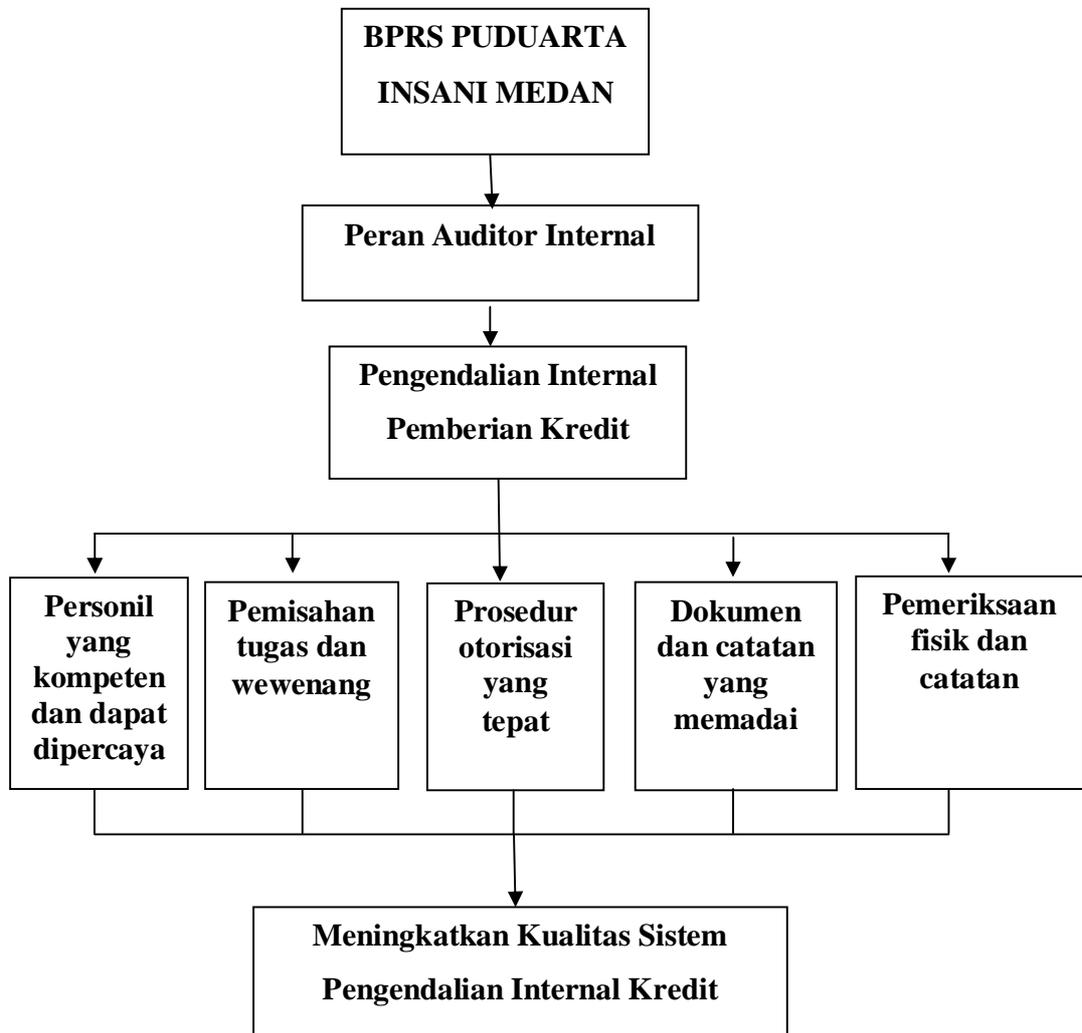
B. Kerangka Berpikir

Sejalan dengan berkembangnya perusahaan maka kemampuan manajemen untuk mengawasi kegiatan perusahaan secara langsung berkurang, sedangkan manajemen dituntut punya sikap dan cara kerja yang profesional dalam mencapai hasil-hasil yang telah digariskan perusahaan. Manajemen harus selalu melihat, meneliti, dan mengantisipasi setiap kejadian dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan keterbatasan tersebut, maka manajemen dalam melakukan tindakan profesionalnya akan lebih tergantung pada laporan-laporan yang diterima.

Untuk itu perlu diciptakan suatu sistem yang menjamin bahwa kondisi dan kejadian yang dilaporkan adalah benar, sehingga tindakan pengambilan keputusan manajemen dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dalam perusahaan yang semakin berkembang pembentukan struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Struktur organisasi yang baik harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi antara departemen operasional, penyimpanan dan akuntansi, sehingga dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan, walaupun pengendalian internal yang baik telah dirancang dan ditetapkan tetapi bukan berarti bahwa proses telah ditaati, kecurangan dan pemborosan tidak terjadi serta efisiensi dan efektivitas tercapai seperti yang diharapkan, melainkan keberhasilan tetap tergantung pada kendala pelaksanaannya.

Dengan adanya laporan yang dibuat oleh auditor internal mengenai hasil pemeriksaannya, dapat membantu manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi pada pengendalian internal pembiayaan (kredit) macet. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya auditor internal, maka akan membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal pembiayaan (kredit) macet.



Gambar II-1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisa dan diproses dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari dan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini yaitu peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemberian kredit.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan, adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Sawyer's (2005:7) auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha.
2. Menurut Mulyadi (2010:165) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan

tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

3. Menurut Rivai *et al* (2007:4) “Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau utang dari satu pihak (kreditor) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.”

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Objek penelitian ini yaitu PT. BPRS Paduarta Insani Tembung yang beralamat di Jalan Besar Tembung No. 13A, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018.

Tabel III-1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2017				Des 2017				Jan 2018				Feb 2018				Mar 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■																
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
3.	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
4.	Seminar Proposal																	■			
5.	Pengumpulan Data																		■		
6.	Bimbingan Skripsi																			■	
7.	Sidang Skripsi																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016: 13) penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan yaitu melalui catatan dan dokumen auditor internal dan data yang telah dikelola oleh PT. BPRS Puduarta Insani.

2. Sumber Data

- a. Menurut Arfan (2014:122) data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontrak) langsung antara si peneliti dengan responden. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data secara langsung dari pihak terkait sebelum diolah penulis. Data primer didapatkan dengan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*) dengan auditor internal PT. BPRS Puduarta Insani.

- b. Menurut Arfan (2014:122) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Pencairan terhadap sumber-sumber tersebut tentunya didasarkan pada permasalahan penelitian. Permasalahan ini umumnya berhubungan dengan kesenjangan yang ada pada organisasi perusahaan. Untuk menjawab masalah, peneliti harus mengembangkan pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari data yang telah diolah perusahaan dan juga buku-buku literatur seperti garis tugas (*job description*) auditor internal, fungsi dan tanggung jawab

auditor internal, serta sistem dan prosedur pada PT. BPRS Puduarta Insani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut Sugiyono (2016:145) teknik observasi adalah peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode observasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data laporan kredit yang bersumber dari PT. BPRS Puduarta Insani.
3. Menurut Tohirin (2012:63) wawancara mendalam (*independent interview*) biasanya dilakukan secara tidak terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, biasanya lebih diutamakan pertanyaan terbuka. Hindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, senang atau tidak senang dan jawaban-jawaban singkat lainnya yang mencerminkan pertanyaan tertentu.

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data melalui tanya jawab (*interview*) langsung dengan auditor internal sesuai dengan data yang diperlukan atas objek yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Shella (2014) metode analisis deskriptif yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas individu atau kelompok untuk memperoleh pengetahuan atau informasi dari hasil wawancara dan pengamatan yang berbentuk deskripsi atau gambaran yang mendalam tentang objek yang diteliti. Berikut ini tahapan analisis data penelitian yang dilakukan penulis, dengan cara:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diperoleh penulis melalui proses wawancara dengan auditor internal pada PT. BPRS Puduarta Insani.
2. Menganalisis hasil wawancara dengan cara membandingkan jawaban responden dengan teori yang ada.
3. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT BPRS Puduarta Insani Tembung didirikan berdasarkan akte Notaris Ny. Chairani Bustami, SH dengan akte No. 3 tanggal 4 Juli 1994. Saat itu Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

PT BPRS Puduarta Insani Tembung mulai beroperasi tanggal 18 Juni 1996. Peresmian operasionalnya ketika itu dilakukan oleh Sekretaris wilayah daerah Sumatera Utara H. A. Wahab Dalimunthe, SH (mewakili Gubernur Sumatera Utara). Pada saat pengajuan permohonan pengesahan akte ke Menteri Kehakiman, diajukan nama PT BPRS Insani. Namun didapati bahwa nama BPRS Insani telah ada. Untuk menyegerakan proses, seseorang di Departemen Kehakiman mengusulkan penambahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Puduarta Insani. Menurut informasi

kata "**Puduarda**" berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti "Rumah Harta". Pengesahan Menteri Kehakiman diperoleh tanggal 20 Desember 1994 dengan Nomor Keputusan 02-18.631.HT.01.01 th 1994.

PT BPRS Puduarda Insani Tembung bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik serta kenyamanan kepada para nasabah dan memberi kontribusi yang baik bagi perekonomian. Adapun visi dan misi yang dimiliki PT BPRS Puduarda Insani Tembung adalah sebagai berikut:

Visi:

1. Menjadi BPRS terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada perangkat nasional.

Misi:

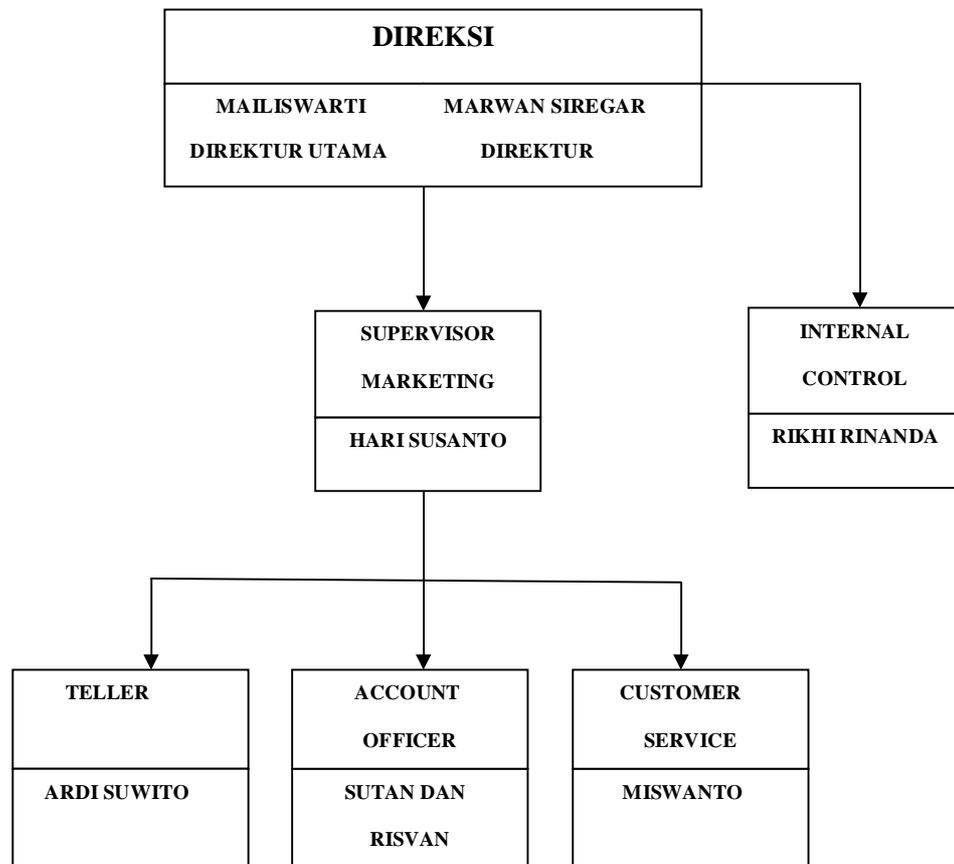
1. Menerapkan prinsip syariah secara murni
2. Melayani secara professional
3. Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
4. Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

2. Struktur Organisasi

Sebelum menjalankan aktivitas perusahaan sangatlah penting membuat tata hubungan daripada wewenang dan tugas masing-masing bagian pada perusahaan. Hal ini sangatlah berguna agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat diketahui dengan jelas oleh masing-masing individu di

dalam perusahaan tersebut, sehingga tugas setiap bagian dapat diarahkan dan dipertanggung jawabkan dengan sepenuhnya. Struktur organisasi pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung adalah berbentuk organisasi garis dan staf, ini terbukti dengan adanya satu pimpinan. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan menggunakan dana, alat-alat dan teknologi serta terikat dengan peraturan-peraturan dan lingkungan tertentu supaya dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

PT BPRS Puduarta Insani Tembung struktur organisasinya terdiri dari *Supervisor Marketing, Account Officer (AO), Teller* dan *Customer Service* yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Adapun bagan struktur organisasi PT BPRS Puduarta Insani Tembung adalah sebagai berikut :



Gambar IV-1 Struktur Organisasi PT BPRS Puduarta Insani Tembung

(Sumber: PT BPRS Puduarta Insani Tembung, 2018)

Dalam gambar di atas dapat dilihat mengenai posisi atau kedudukan auditor internal, dimana pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung disebut *internal control*:

1. Auditor internal berada di bawah Dewan Komisaris
2. Auditor internal berada di bawah Direksi
3. Auditor internal berada di bawah Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan uraian tugas dari masing-masing jabatan pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung, yaitu:

1. Direksi

- a. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Direksi bertanggungjawab kepada komisaris terhadap kegiatan operasional BPRS.
- c. Direksi menyusun rencana strategis perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Direksi mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di dalam BPRS untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana tertuang di dalam rencana kerja yang telah disetujui dan disahkan oleh BPRS.
- e. Direksi menjalin hubungan dengan pihak eksternal baik Bank Indonesia selaku pengawas perbankan, pemerintah setempat maupun instansi lain yang terkait dengan operasional bank.
- f. Direksi bertanggungjawab memelihara tingkat kesehatan bank dan menghindari dari pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi membahayakan bank.

2. *Supervisor Marketing*

- a. Mengevaluasi usulan-usulan pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan apakah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kelayakan sesuai ketentuan internal BPRS maupun ketentuan Bank Indonesia.
- b. Memberi pertimbangan (persetujuan/ penolakan) terhadap usulan-usulan pembiayaan yang diajukan oleh staf pembiayaan.

- c. Melakukan monitoring terhadap *performance* seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan, sehingga terhindar dari pembiayaan yang bermasalah.
- d. Membina hubungan baik dengan nasabah BPRS.
- e. Menghimpun dana dan menggali potensi-potensi sumber dana dalam bentuk tabungan maupun deposito.
- f. Mengorganisir, mengarahkan dan menggerakkan seluruh staf marketing agar bekerja sesuai prosedur dan senantiasa meningkatkan kemampuan atau keterampilannya dan mengawasi kualitas pembiayaan agar bank terhindar dari potensi kerugian.

3. *Teller*

- a. Melayani setoran dan penarikan tunai menyangkut transaksi tabungan, deposito, pembiayaan maupun pembayaran dan penerimaan lainnya terkait dengan bank.
- b. Mengelola kecukupan saldo kas di bank agar tidak kekurangan dan tidak melebihi limit dan menghindari segala potensi kerugian kas yang dapat timbul.
- c. Melaporkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan.
- d. Melakukan perhitungan saldo dan rekapitulasi mutasi kas pada akhir hari dan mencocokkan dengan pembukuan *general ledger*.

4. *Account Officer*

- a. Melakukan pemeriksaan usaha debitur dengan agunan
- b. Membuktikan analisa keputusan pemberian kredit

- c. Melakukan pemeriksaan ke tempat debitur
- d. Menerima setoran debitur di luar kantor

5. *Customer Service*

- a. Menyiapkan bukti pembukuan berdasarkan dokumen sumber
- b. Mencetak daftar mutasi harian teller
- c. Melaksanakan kegiatan pengarsipan
- d. Melakukan verifikasi awal pada bukti pembukuan
- e. Menyerahkan bukti pembukuan dan daftar mutasi harian kepada kepala unit.

6. *Internal Control*

a. Tugas Harian

- 1. Memeriksa tiket-tiket transaksi operasional
- 2. Memeriksa neraca laba rugi transaksi harian
- 3. Menyusun laporan rekonsiliasi tabungan antar Bank
- 4. Mengontrol kebersihan kantor
- 5. Mengontrol karyawan terhadap kehadiran, kedisiplinan, pelayanan, keseragaman dan kerapian pakaian

b. Tugas Bulanan

- 1. Memeriksa kecocokan *proofing* saldo bulanan
- 2. Membantu membuat dan menyimpan laporan Komisaris dan DPS
- 3. Membuat dan menyimpan laporan *internal control*
- 4. Membuat dan menyimpan surat undangan rapat Komisaris dan DPS
- 5. Memeriksa pembayaran pajak dan BPJS kesehatan/ketenagakerjaan

6. Memeriksa dokumentasi pembayaran
 7. Memeriksa penyelesaian TBO
 8. Menyimpan notulen rapat komisaris
- c. Tugas Tahunan
1. Sama dengan tugas bulanan
 2. Membuat undangan RUPS kepada Pemegang Saham

3. Pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS Pudarta Insani Tembung

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana

kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*.

Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Pada prinsipnya, dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, *nisbah* pembagian keuntungan, periode pembagian

keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.

Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

- a. Laba pembayaran mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b. Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung adalah akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Bank memberikan

modal usaha kepada nasabah untuk dikelola. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam akad pembayaran.

Pembiayaan *mudharabah* telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional bahwa fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Pembiayaan *mudharabah* pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank tentang kegiatan usahanya yang membutuhkan modal bank.
- b. Pada umumnya nasabah telah memiliki usaha yang produktif, sehingga bank membiayai bagian tertentu dari usaha nasabah.
- c. Bank dengan nasabah bersepakat tentang *nisbah* masing-masing dari keuntungan yang diperkirakan.
- d. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- e. Pada ketika negosiasi bank berupaya memperkirakan keuntungan pada kisaran 12% sampai dengan 40% pertahun.
- f. Saat pembayaran cicilan dan bagi hasil oleh nasabah, disesuaikan dengan tanggal pencairan pembiayaan.
- g. Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau pada saat jatuh tempo atau dilakukan secara angsuran.

- h. Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.
- i. Bank juga bekerjasama dengan asuransi syariah untuk dapat *cover* jumlah pembiayaan nasabah apabila nasabah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang ditinggalkan tidak menanggung beban/ utang nasabah tersebut.

4. Sistem Pengendalian Intern PT BPRS Puduarta Insani Tembung

Sistem Pengendalian intern PT BPRS Puduarta Insani Tembung merupakan cara atau metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka proses operasional perusahaan khususnya mengenai kredit agar hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, dan untuk menjaga pemberian kredit dari penyelewengan-penyelewengan. Sistem Pengendalian intern kredit pada terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengawasan

Pengawasan PT BPRS Puduarta Insani Tembung mensyaratkan agar transaksi pemberian kredit yang terjadi berdasarkan bukti dan data sebenarnya. Lingkungan pengawasan PT BPRS Puduarta Insani Tembung adalah pemisahan fungsi analisis kredit, fungsi otorisasi, fungsi pembayar dan fungsi pencatat. Fungsi otorisasi dilakukan oleh *Supervisor Marketing* sedangkan fungsi pembayar dilakukan oleh *Teller*, fungsi pengecek dilakukan oleh *Account Officer* dan fungsi pencatata dilakukan oleh *Customer Service* atau bagian pembukuan.

Pemisahan fungsi yang dimaksudkan oleh perusahaan adalah untuk menjaga kelayakan pemberian kredit, ketelitian dan keandalan data yang dihasilkan dalam kelayakan pemberian kredit.

Pemisahan fungsi pengecek kelayakan kredit, fungsi pembayar dan fungsi pencatat dalam lingkungan pengendalian pemberian kredit ini dimaksudkan perusahaan agar terciptanya suatu keterkaitan dalam tiap-tiap bagian dalam hal transaksi pemberian kredit sehingga meminimalkan terjadinya penyelewengan atas pemberian kredit.

2. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit

Sistem akuntansi pemberian kredit PT BPRS Puduarta Insani Tembung merupakan jaringan prosedur kegiatan yang dibuat terpadu dalam hal transaksi pemberian kredit. Sistem akuntansi pada perusahaan terdiri dari Formulir, buku harian dan laporan.

Bukti

Bukti merupakan dokumen yang digunakan perusahaan untuk merekam terjadinya transaksi pemberian kredit yang terjadi di perusahaan. Bukti-bukti dalam sistem akuntansi pemberian kredit adalah Surat Permohonan kredit, bukti diri, surat agunan kepemilikan dan kuitansi pencairan kredit. Dalam Surat Permohonan kredit ini akan terlihat keterangan *plafond* yang diminta oleh debitur, waktu, keperluan penggunaan pinjaman, nama, tanda tangan/cap jempol.

Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan pengeluaran kas akibat pemberian kredit kepada debitur pada perusahaan. Dalam pencatatan pemberian kredit ini dicatat ke dalam catatan akuntansi yang dilakukan dengan memperhatikan prosedur pencatatan sebagai berikut, yaitu:

1. Pencatatan pemberian kredit ke dalam catatan akuntansi didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.
2. Pencatatan pemberian kredit ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu.

Laporan

Laporan pemberian kredit pada perusahaan akan disajikan dalam bentuk laporan kredit bulanan perusahaan. Dalam laporan kredit tersebut akan terlihat jumlah kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada debitur baik penambahan kredit maupun pengurangan kredit. Laporan ini juga merupakan dasar menilai apakah kredit tersebut masih dapat ditagih atau tidak. Laporan pemberian kredit ini akan disajikan di dalam neraca perusahaan sebagai aktiva lancar.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Untuk menciptakan pengendalian kredit yang baik pihak perusahaan menyusun prosedur-prosedur, adapun bagian yang terlibat

dalam prosedur pemberian kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung adalah :

- a. Nasabah atau Debitur.
- b. Supervisor Marketing
- c. Teller
- d. Account Officer (AO)
- e. Customer Service (CS)

Dalam prosedur pemberian kredit ini setiap calon nasabah harus mengajukan permohonan atau pendaftaran kredit. Oleh pihak perusahaan akan diberitahu keterangan-keterangan mengenai ketentuan-ketentuan pemberian kredit kepada calon nasabah.

Setelah calon nasabah melengkapi suatu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung maka pegawai bank *Customer Service* membuat surat permohonan pinjaman (SKPP) lalu dicatat pada register SKPP.

Customer Service selanjutnya mengisi keterangan-keterangan yang berhubungan dengan permintaan kredit yang telah diajukan oleh nasabah. Jika semua kelengkapan sudah disiapkan maka CS akan memberikan kepada *Supervisor Marketing*. Selanjutnya *Supervisor Marketing* akan memberikan disposisi untuk ditindak lanjuti oleh AO atas data-data yang diisi oleh calon nasabah yang termuat di dalam formulir surat permohonan pinjaman.

Kemudian AO akan melakukan pemeriksaan usaha debitur dan agunan kredit. Sebelum memberikan persetujuan pencairan kredit oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung terlebih dahulu melakukan penilaian-penilaian terhadap calon nasabah yang sudah mengajukan permohonan kredit. AO yang secara langsung melakukan penilaian-penilaian kepada calon nasabah setelah AO menerima surat keterangan permohonan pinjaman (SKPP) dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk mengajukan kredit dari CS yang semua berkas sudah teliti secara administratif. AO akan menilai langsung ke rumah tempat usaha dan agunan yang diberikan dari calon nasabah.

AO dalam penilaiannya juga melihat aspek-aspek 5 C nasabah dari permohonan kredit. Jika penilaiannya ini baik maka PT BPRS Puduarta Insani Tembung akan menindak lanjuti agar permohonan kredit yang diajukan nasabah dapat segera dicairkan. AO setelah melakukan penilaian kepada calon nasabah dapat segera dicairkan. AO setelah melakukan penilaian kepada calon nasabah hasil laporannya akan diberikan kepada *Supervisor Marketing* untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya CS akan memberikan surat permohonan kredit kepada *Supervisor Marketing* yang telah dianalisa kelayakannya oleh AO. *Supervisor Marketing* akan menilai kembali hasil laporan yang telah dibuat oleh AO dan mengambil keputusan apakah kredit dapat dicairkan atau tidak. Setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan maka pihak PT BPRS Puduarta Insani Tembung akan melakukan kembali penilaian kredit dengan

memantau dan mengevaluasi tingkat kesehatan kredit yang telah diberikan kepada nasabah. Dan apabila *Supervisor Marketing* setuju, maka akan menanda tangani kuitansi pencairan kredit yang sebelumnya diverifikasi oleh CS untuk diberikan kepada teller untuk mencairkan uang kepada nasabah.

Setelah kredit disetujui maka untuk mencairkannya nasabah akan diberitahu untuk menerima kreditnya. Nasabah harus datang langsung untuk mencairkan pinjamannya dan CS akan memberitahukan kepada nasabah yang akan menjadi hak dan kewajibannya sebagai peminjam. Hak dari nasabah yaitu menerima kredit yang telah disetujui dan kewajibannya nasabah adalah membayar pinjaman pokok serta bunganya.

Kredit yang akan dicairkan akan dicatat dan disimpan oleh CS di komputer dengan memberikan bukti tanda sudah dicairkannya kredit dan jika nasabah mau membayar angsuran kreditnya akan dicatat dan disimpan juga di komputer dengan memberikan bukti tanda setoran.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Kredit

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha perbankan yang utama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk memperoleh laba yang optimal. Pemberian kredit akan menarik perhatian nasabah untuk meminjam uang ke bank. Pemberian kredit ini akan menimbulkan piutang usaha yang harus ditagih perbankan kepada nasabah yang telah berhutang atau menerima pinjaman. Agar piutang dapat ditagih

tepat waktu dan tidak menimbulkan adanya kerugian bagi perbankan maka perbankan perlu melakukan pengawasan kredit.

Sistem pengendalian intern kredit pada perusahaan bertujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, sehingga catatan itu benar dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dan memajukan efisiensi dalam operasi serta membantu menjaga agar tidak ada penyimpangan dari kebijaksanaan pimpinan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Seperti yang telah uraikan sebelumnya bahwa unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit terdiri dari tiga unsur. Dalam pembahasan ini penulis hanya menitik beratkan pada unsur-unsur tersebut.

a. Lingkungan Pengawasan

Lingkungan pengawasan kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung tidak terlepas dari struktur organisasi perusahaan. Dimana struktur organisasi merupakan bagan atau kerangka yang memperlihatkan hubungan kerja di dalam suatu organisasi serta menetapkan tugas-tugas apa yang harus dikerjakan khususnya mengenai pemberian kredit, sehingga struktur organisasi merupakan sarana bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya struktur organisasi tersebut maka akan terlihat hubungan antara fungsi-fungsi, wewenang serta tanggung jawab setiap

unit organisasi dalam hal pemberian kredit, dan melalui struktur organisasi akan memungkinkan terciptanya koordinasi usaha antara semua unit organisasi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan, khususnya mengenai pemberian kredit.

Jika dilihat dari struktur organisasi PT BPRS Puduarta Insani Tembung maka telah terdapat suatu struktur organisasi yang baik, dimana pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari para karyawan sudah jelas, sehingga tidak menimbulkan pekerjaan yang tumpang tindih ataupun birokrasi yang panjang yang dapat mengurangi operasi kelancaran operasi perusahaan. Hal ini terlihat dari bagan organisasi dan uraian tugas yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Dalam hal pemberian kredit pun struktur organisasi perusahaan sudah memisahkan fungsi pencatatan yang dilakukan oleh CS dengan fungsi pencairan kredit yang dilakukan oleh teller, serta fungsi otorisasi oleh *Supervisor Marketing* dan analisa kredit oleh AO. Dengan pemisahan fungsi ini dalam struktur organisasi telah menciptakan lingkungan pengawasan pemberian kredit yang memadai, karena dengan pemisahan fungsi ini, catatan akuntansi yang dibuat CS dapat berfungsi sebagai pengawas semua pemberian kredit yang dilakukan oleh teller, sedangkan kelayakan pemberian kredit yang dilakukan oleh AO harus mendapat otorisasi oleh *Supervisor Marketing*.

b. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit

Sistem akuntansi sebenarnya merupakan jaringan penghubung yang sistematis dalam menyajikan informasi yang berguna dan dapat dipercaya untuk membantu pimpinan dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu sistem akuntansi merupakan alat pengawasan intern, jadi suatu sistem akuntansi itu dapat membantu proses manajemen dan dapat mendorong para karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Sistem akuntansi pemberian kredit yang diterapkan oleh PT BPRS Puduarta Insani Tembung dimaksudkan untuk menyajikan informasi atas pemberian kredit yang dapat dipercaya dan mendorong karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Sistem akuntansi pemberian kredit yang diterapkan PT BPRS Puduarta Insani Tembung sudah baik. Ini terlihat dari unsur-unsur sistem akuntansi pemberian kredit perusahaan tersebut yang terdiri dari formulir, jurnal dan laporan.

Dimana unsur-unsur sistem akuntansi pemberian kredit perusahaan sudah meliputi unsur-unsur sistem akuntansi pemberian kredit yang baik, karena dengan unsur-unsur sistem akuntansi tersebut maka informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi tersebut akan terjamin mutu dan ketepatan penyajian informasi yang baik. Selain itu juga sistem akuntansi yang diterapkan perusahaan telah menciptakan pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yang baik, karena dengan sistem akuntansi tersebut

keandalan informasi akuntansi dan catatan piutang karena pemberian kredit sudah baik.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam sistem pengawasan intern pemberian kredit, prosedur pemberian kredit merupakan salah satu unsur yang harus perlu diterapkan dalam pengawasan intern pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung. Prosedur pemberian kredit pada perusahaan merupakan urutan kegiatan dalam pemberian kredit yang melibatkan beberapa bagian, seperti nasabah yang memerlukan kredit tersebut, *Supervisor Marketing*, CS, AO dan teller.

Prosedur pemberian kredit yang sudah diterapkan perusahaan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan urutan kegiatan pemberian kredit yang diterapkan perusahaan harus melibatkan beberapa bagian. Mulai dari permohonan pengajuan kredit yang diusulkan oleh nasabah terlebih dahulu harus diteliti bukti pendukung atas jumlah permohonan kredit yang dimohonkan tersebut oleh bagian CS dan selanjutnya harus mendapat disposisi dari *Supervisor Marketing* untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan oleh AO sehingga angka yang dimohonkan tersebut berdasarkan angka yang sebenarnya.

Dengan prosedur pemberian kredit tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal pemberian kredit harus melibatkan beberapa bagian yang saling terkait, sehingga terjadi internal check antar bagian tersebut. Dengan prosedur yang diterapkan perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit tidak bisa dilakukan oleh satu bagian saja, namun harus melalui bagian-

bagian yang saling mengecek, sehingga urutan kegiatan tersebut dapat menjaga pemberian kredit dari penyelewengan.

Namun walaupun demikian, masih terdapat kelemahan dalam prosedur pemberian kredit yaitu dalam hal penagihan. Karena tugas ini juga dilaksanakan oleh AO sehingga tugas AO menjadi rangkap yaitu sebagai analis kredit dan kolektor. Dengan tugas rangkap ini, fungsi AO akan kurang maksimal karena saat penagihan dilakukan pada akhir bulan dan jumlahnya relatif banyak, sehingga bila pada kondisi tersebut ada pengajuan kredit dan membutuhkan analisa dari AO tentu fungsinya akan terpecah karena di satu sisi AO harus dapat menagih dari debitur. Hendaknya pihak manajemen perusahaan mempertimbangkan untuk menambah personil yang tugasnya hanya sebagai kolektor agar dalam penagihan lebih maksimal.

Selain itu, hendaknya perusahaan juga menambah auditor internal untuk memaksimalkan sistem pengawasan kredit. Karena pada dasarnya, agar efektif suatu sistem pengawasan intern terhadap kekayaan perusahaan harus didukung bagian yang tugasnya memeriksa yang biasanya disebut dengan auditor internal. Auditor internal merupakan bagian atau pegawai dalam perusahaan yang tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja itu sesuai atau menyimpang dari yang sudah ditetapkan.

Dalam pengawasan terhadap pemberian kredit perusahaan, fungsi auditor internal adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan sistem pengawasan intern pemberian kredit. Apabila ditemukan penyimpangan atau kesalahan hendaknya auditor internal memberikan solusi atas masalah yang dihadapi tersebut. Dengan fungsi auditor internal tersebut, maka akan memaksimalkan sistem pengawasan intern perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung, dapat disimpulkan bahwa:

Kebijakan manajemen atas pemberian tugas dan wewenang auditor internal pada BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan prosedur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) auditor internal yang ada, yaitu dimana posisi auditor internal BPRS Puduarta Insani Tembung yang bersifat independen dalam artian kedudukannya terpisah dari semua kegiatan operasi perusahaan dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diauditnya, dalam hal ini adalah kegiatan usaha kredit.

Peran auditor internal dalam pengendalian intern pemberian kredit belum memadai. Hal ini didukung dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa pemberian kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung kurang adanya pengawasan yang memadai. Hal ini dikarenakan auditor internal belum menjalankan sepenuhnya standard pekerjaan lapangan yang baik, belum menerapkan sepenuhnya audit planning, audit prosedur, dan audit program.

B. Saran

Setelah menguraikan pembahasan dan mengemukakan kesimpulan terhadap BPRS Puduarta Insani, peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang dapat digunakan atau menjadi bahan pertimbangan BPRS Puduarta Insani dalam

meningkatkan kinerja auditor internal dan dapat meminimalisir adanya kredit bermasalah melalui peran auditor internal, antara lain:

1. Sebaiknya manajer atau dewan direksi menambahkan tenaga ahli auditor internal, karena pada BPRS Puduarta Insani ini auditor internal hanya ada satu. Kurangnya sumber daya manusia merupakan salah satu alasan untuk harus ditingkatkannya lagi kinerja audit.
2. Diharapkan sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT BPRS Puduarta Insani Tembung ditingkatkan dengan cara memberikan pembekalan pada karyawan baik yang dilakukan oleh kantor dan juga pelatihan dari Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah Salim (2016). *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Sawyer, Lawrence (2005). *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hery (2013). *Auditing I (Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi)*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Kasmir 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi (2001). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Seprida Hanum (2015) *Sistem Akuntansi*. Medan: Perdana Publishing.
- Ismail (2010). *Akuntansi Bank*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arfan dkk (2016). *Analisa Laporan Keuangan*. Medan: Madenatera.
- Tohirin (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ismail (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Rivai *et al* (2007). *Bank and Finance Institution Management: Conventional and Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arfan dkk (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: Ciptapustaka Media.
- Sukrisno Agus (2004). *Auditing*. Medan: Salemba Empat.
- Muljono, Teguh Pujo (2001). *Manajemen Perkreditan (Bagi Bank Komersil)*. Yogyakarta : BPFE.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rizanna Amanina (2011). "Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern pada Proses Pemberian Kredit Mikro". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

- Putri, Dian Anggari (2006). "Sistem Pemberian Kredit pada PT. BPR Mekar Nugraha Klepu". Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Rosy, Shella Nevalina (2014). "Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya". Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Sarabaya.
- Haryani, Clara Niken Dwi (2014). "Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit". Fakultas Ekonomi Universitas Senata Dharma. Yogyakarta.
- Fatwandini, Ainur Zurlis (2015). "Analisis Pengendalian Intern Pemeberian Kredit (Studi Kasus pada BPRS Jember Lestari)". Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember.
- Putra, Muhammad Hanas Adi (2016). "Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Vo.39 No.1, Oktober 2016.
- Susanto, Ahmad Fauzan (2017). "Peranan Audit Internal dalam Pengendalian Internal Persediaan pada PT. H&CO Cabang Howey Patissier. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Daftar Wawancara pada PT. BPRS Puduarta Insani

1. Bagaimana peran auditor internal pada PT. BPRS Puduarta Insani terutama pada bagian pembiayaan (kredit)?
2. Bagaimana peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern kredit?
3. Bagaimana sistem pengendalian intern kredit yang diterapkan pada perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani?
4. Apakah SOP (standar operasional prosedur) menjadi acuan dalam melakukan kegiatan operasional ?
5. Apakah sistem pengendalian intern kredit dilaksanakan sesuai SOP atau prosedur yang dibuat perusahaan?
6. Apakah dalam aktivitas pengendalian terdapat audit planning, audit program, dan audit prosedur?
7. Bagaimana perkembangan usaha pembiayaan (kredit) pada BPRS Puduarta Insani?
8. Apa saja syarat kredit yang diberikan untuk nasabah BPRS Puduarta Insani?
9. Apa saja agunan yang disyaratkan kepada nasabah?
10. Bagaimana BPRS Puduarta Insani dapat mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan kredit?
11. Berapa persentase terjadinya kredit macet pada BPRS Puduarta Insani pada tahun 2014-2017?
12. Apa sajakah indikator terjadinya kredit macet yang ada pada BPRS Puduarta Insani
13. Bagaimana tingkat pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal terhadap kredit macet?
14. Apakah audit internal pada BPRS Puduarta Insani memiliki standar kinerja yang dijadikan pedoman kerja sebagai auditor internal? dan seperti apakah bentuk standar kinerja tersebut?
15. Bagaimana kinerja yang dilakukan audit internal dalam menangani kredit bermasalah pada BPRS Puduarta Insani?
16. Apakah terdapat kebijakan dalam menentukan jangka waktu pemberian pembiayaan (kredit)?
17. Apakah petugas bank selalu memelihara komunikasi dengan nasabah dan kunjungan langsung ke lokasi usaha secara rutin? dan seperti apakah bentuk komunikasi yang dilakukan?
18. Apakah auditor internal melakukan identifikasi dini atas kasus macet bermasalah pada nasabah secara langsung? Dan bagaimana bentuk identifikasi dini tersebut?
19. Bagaimana prosedur pemberian kredit?

Minta data:

20. Kebijakan manajemen atas pemberian tugas dan wewenang auditor internal
21. Program kerja audit internal lanjutan oleh auditor internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah
22. Laporan pemberian kredit PT BPRS Puduarta Insani
23. Rekomendasi auditor internal atas kredit macet
24. Hasil kinerja auditor internal dan penyelesaian pada PT BPRS Puduarta Insani
25. Kerja kerja auditor internal